`

BAB VI
PENUTUP

6.1 Pengantar

Penanganan stunting di Kabupaten Agam menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan agenda nasional dalam percepatan penurunan prevalensi stunting di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Agam telah mengambil berbagai langkah strategis, seperti membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di berbagai tingkatan, menyusun regulasi dan perencanaan yang tertuang dalam dokumen RPJMD, serta mengembangkan inovasi lokal seperti program *SIKOCIT* dan *Bapak Asuh Anak Stunting*. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menurunkan prevalensi stunting secara berkelanjutan melalui penguatan peran lintas sektor dan pemenuhan gizi anak sejak 1000 Hari Pertama Kehidupan. Namun, di balik berbagai upaya tersebut, masih ditemukan sejumlah tantangan dalam hal koordinasi lintas sektor, konsistensi pelaksanaan kebijakan, dan efektivitas kerja sama antar aktor dalam jaringan kebijakan.

Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan utama: *bagaimana dinamika interaksi aktor dalam jaringan kebijakan penanganan kasus stunting di Kabupaten Agam?* dengan menggunakan pendekatan teori jaringan kebijakan Frans van Waarden yang mencakup tujuh dimensi utama aktor, fungsi, struktur, pelembagaan, aturan perilaku, hubungan kekuasaan, dan strategi aktor penelitian ini mengungkapkan

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

`

sejumlah dinamika, tantangan, dan praktik nyata di lapangan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan stunting.

Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa jaringan kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Agam melibatkan berbagai aktor formal dan non-formal, mulai dari dinas-dinas teknis (seperti Dinas Kesehatan dan DPPKB), pemerintah nagari, tenaga kesehatan, hingga masyarakat terdampak. Namun, interaksi antar aktor masih belum sepenuhnya terintegrasi. Secara fungsional, koordinasi lintas sektor berjalan secara normatif, tetapi dalam praktiknya masih terdapat ego sektoral dan kendala komunikasi. Struktur jaringan yang bersifat hirarkis menyebabkan alur koordinasi terhambat di tingkat teknis, sedangkan pelembagaan kebijakan masih menghadapi tantangan akibat lemahnya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang konsisten.

Secara teoritis, penelitian ini menegaskan relevansi teori jaringan kebijakan dengan realitas implementasi kebijakan multisektor seperti penanganan stunting. Dinamika politik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan stunting bukanlah proses netral, melainkan penuh dengan tarik-menarik kepentingan kelembagaan, hierarki kewenangan, serta tuntutan performatif. Oleh karena itu, pendekatan teknokratis saja tidak cukup, tetapi harus disertai reformasi koordinasi dan tata kelola antar-aktor. Ketergantungan antar aktor dalam jaringan ternyata tidak serta-merta menghasilkan sinergi, melainkan memerlukan pemahaman bersama terhadap peran, fungsi, dan strategi yang dijalankan. Ini sesuai dengan prinsip interdependensi dalam teori jaringan kebijakan, yang menuntut adanya koordinasi horizontal dan

`

vertikal yang efektif. Penelitian ini memperkaya studi kebijakan publik dengan menunjukkan bahwa kompleksitas kebijakan multisektor tidak hanya terletak pada banyaknya aktor, tetapi juga pada kapasitas mereka dalam membangun hubungan kerja yang efektif dan setara.

Dari segi kontribusi praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan, khususnya di daerah, untuk membangun desain kebijakan yang lebih adaptif, inklusif, dan berbasis kolaborasi. Temuan bahwa lemahnya koordinasi antar-OPD, tidak adanya standar pelembagaan yang mengikat lintas sektor, serta dominasi aktor tertentu dalam distribusi kekuasaan, menjadi pelajaran penting bagi reformulasi tata kelola kebijakan penurunan stunting. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat dan aktor informal seperti kader posyandu, tokoh nagari bahkan pihak swasta masih menjadi aset sosial yang belum dioptimalkan secara kelembagaan.

Sebagai bentuk kebaruan *(novelty),* temuan utama yang ingin ditegaskan adalah interaksi yang tidak terintegrasi maksud dari istilah ini adalah interaksi antarsektor dalam penanganan stunting di Kabupaten Agam belum berjalan secara terintegrasi, Meskipun secara nasional sudah ada kebijakan yang mendorong kerja sama lintas sektor, di lapangan masih banyak OPD yang menjalankan program sendiri-sendiri, sesuai dengan arahan dari kementerian masing-masing. Artinya, kerja sama antarlembaga di daerah belum terbangun secara kuat dan menyeluruh. Masalah ini tidak hanya terkait kurangnya koordinasi, tapi juga disebabkan oleh tidak adanya aturan kerja bersama yang jelas, seperti panduan teknis, SOP, atau nota kesepahaman antar OPD. Selain itu, belum semua OPD memiliki kesadaran untuk saling mendukung

`

dan bekerja secara bersama-sama. Akibatnya, program penanganan stunting sering tumpang tindih, tidak efisien, dan tidak maksimal dampaknya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan sudut pandang baru bahwa keberhasilan penanganan stunting membutuhkan penguatan kerja sama lintas sektor yang konkret, terstruktur, dan saling terhubung di tingkat daerah.

6.2 Saran dan Rekomendasi

Penelitian ini berjudul Dinamika Interaksi Aktor dalam Jaringan Kebijakan Penanganan Kasus Stunting di Kabupaten Agam. Penelitian ini berangkat dari permasalahan klasik dalam kebijakan multisektor, yaitu lemahnya integrasi dan koordinasi antar-aktor dalam jaringan kebijakan, meskipun struktur formal seperti TPPS telah dibentuk secara lengkap hingga tingkat nagari. Penelitian ini menggunakan perspektif teori jaringan kebijakan Frans van Waarden untuk menganalisis bagaimana pola interaksi, fungsi, struktur, aturan perilaku, pelembagaan, hubungan kekuasaan, dan strategi aktor membentuk dinamika pelaksanaan kebijakan stunting di tingkat lokal.

Penelitian ini tidak hanya memetakan siapa aktornya, tetapi penelitian ini mengungkapkan sebuah dinamika dengan menggali ketegangan, ketidakseimbangan, dan ketidakterhubungan antar fungsi dalam jaringan, yang seringkali tidak terlihat dalam kajian stunting berbasis angka prevalensi semata. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama dari sisi cakupan wilayah yang hanya difokuskan pada dua kecamatan dan pendekatan kualitatif yang belum mampu menangkap secara

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

`

menyeluruh hubungan kausal antar dimensi jaringan kebijakan. Oleh karena itu, saran bagi penelitian selanjutnya adalah agar pendekatan ini dikembangkan lebih lanjut ke arah *multilevel policy network analysis*, yang tidak hanya melihat dinamika pada satu level pemerintahan (kabupaten), tetapi juga pada relasi antara pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga nagari dalam satu kerangka jaringan dinamis. Selain itu, analisis hubungan antara aktor formal dan informal, terutama masyarakat terdampak, tokoh adat, organisasi keagamaan, dan pelaku swasta lokal perlu lebih dielaborasi untuk menemukan pola relasi informal yang justru berpengaruh kuat terhadap efektivitas kebijakan.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi Pemerintah Kabupaten Agam dalam memperkuat efektivitas jaringan kebijakan stunting. Pemerintah perlu merumuskan regulasi daerah atau *Peraturan Bupati* yang lebih teknokratis dalam mengatur hubungan kerja lintas OPD dan penguatan peran nagari. Selain itu, perlu dilakukan reformulasi strategi komunikasi dan evaluasi lintas sektor melalui sistem informasi stunting terintegrasi seperti optimalisasi SIKOCIT dan pelibatan kader KPM secara kelembagaan. Pemerintah juga disarankan untuk membangun komitmen kolektif antaraktor melalui insentif kolaboratif dan penguatan budaya kerja jaringan, agar setiap aktor tidak sekadar menjalankan mandat sektoral, tetapi juga merasa terlibat dalam tujuan bersama. Jika pemerintah benar-benar ingin menjadikan stunting sebagai isu strategis pembangunan jangka panjang, maka dibutuhkan kepemimpinan yang inklusif, koordinasi yang berorientasi pada hasil, serta

`

kebijakan yang tidak hanya normatif, tetapi mampu menyesuaikan dengan dinamika aktor di lapangan.

Secara jangka panjang, hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman perumusan kebijakan penanganan stunting yang berbasis pada praktik kolaborasi nyata dan tidak hanya bersandar pada struktur birokrasi formal. Rekomendasi bagi OPD yang belum terkoordinir dengan baik adalah memperkuat struktur koordinasi lintas sektor melalui peran Bappeda dan TPPS sebagai koordinator, menyusun SOP serta panduan kerja terpadu agar peran tiap OPD lebih jelas, dan mengintegrasikan data program ke dalam satu sistem monitoring bersama. Selain itu, diperlukan penguatan kapasitas aparatur melalui pelatihan konvergensi stunting serta sinergi program di nagari, sehingga intervensi tidak lagi berjalan sektoral, tetapi lebih kolaboratif, terpadu, dan berorientasi pada capaian bersama dalam penurunan stunting.Pemerintah Kabupaten Agam juga dapat mempertimbangkan lahirnya forum lintas pemangku kepentingan berbasis komunitas yang mampu menjadi ruang komunikasi dan advokasi bagi masyarakat terdampak stunting, sehingga solusi yang lahir tidak hanya *top-down*, tetapi juga partisipatif dan berkelanjutan.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA